

ABSTRAK

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis Putusan Bawaslu pada hasil putusan PSPP yang dikeluarkan Bawaslu adalah Hasil Keputusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung dengan Nomor 001/PS/BWSL.BDG.13.10/III/2020 yang dikeluarkan oleh Bawaslu sebagai respon dari permohonan bakal calon kepala daerah yang mengajukan sengketa pada tahapan pilkada kabupaten bandung tahun 2020. Lilis Muslihat dan Wida Hendrawati selaku pemohon dan juga merupakan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bandung melaporkan KPU Kabupaten Bandung ke Bawaslu Kabupaten Bandung terkait dengan berita acara BA.1 KWK yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bandung tentang berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui Syarat Minimal Dukungan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Bandung Tahun 2020 Dihubungkan dengan Keadilan Pemilu.

Teori yang digunakan yaitu teori demokrasi sebagai *grand theory*, teori keadilan pemilu sebagai *middle theory*, serta teori kepastian hukum sebagai *applicate theory*.

Metodologi penelitian yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum dan pendapat sarjana, hematnya metode penelitian yuridis adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan Kepastian hukum mengenai syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung tahun 2020 Aspek kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada Pasal 3. Dalam catatan peneliti, penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bandung pada tahun 2020, dilihat dari pendekatan operabilitas administratif, belum sepenuhnya memenuhi substansi secara optimal. Syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah pada pilkada kabupaten bandung tahun 2020 jika dihubungkan dengan keadilan pemilu.. Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan utama adalah mendapatkan dukungan dari setidaknya 153.443 (seratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga) pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019. kedudukan hukum Bawaslu Kabupaten Bandung dalam memutus perkara nomor 001/PS/BWSL.BDG.13.10/III/2020 tentang syarat minimal dukungan calon pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung tahun 2020 Berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa Bawaslu memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

Kata Kunci: Putusan Bawaslu, Pilkada, Pemilu.

ABSTRACT

In this study, the researcher analyzed the Bawaslu Decision on the results of the PSPP decision issued by Bawaslu is the Result of the Decision on Dispute Resolution for the Election of the Regent and Deputy Regent of Bandung with Number 001/PS/BWSL. BDG.13.10/III/2020 issued by Bawaslu in response to the application of prospective regional head candidates who filed disputes at the stage of the 2020 Bandung Regency Regional Elections. Lilis Muslihat, and Wida Hendrawati as the applicant and also a candidate for the Regent and Deputy Regent of Bandung Regency reported the Bandung Regency KPU to the Bandung Regency Bawaslu related to the minutes of the BA.1 KWK event published by the Bandung Regency KPU regarding the minutes of the results of checking the fulfillment of the amount of support and the distribution of support in the 2020 Bandung Regent and Deputy Regent elections.

The purpose of the research is to find out the Minimum Requirements for Candidate Support in the Regional Head Election in the 2020 Bandung Regency Election in Connection with Election Justice.

The theories used are the theory of democracy as grand theory, the theory of election justice as middle theory, the theory of legal certainty as applicade.

The research methodology is the normative juridical law research method, namely the legal research method which is a document study, namely using legal sources in the form of laws and regulations, court decisions/decrees, contracts/agreements, legal theories and scholarly opinions, the frugal juridical research method is a literature study.

The results of the study show that legal certainty regarding the minimum requirements for candidate support in the 2020 Bandung Regency regional head election (Pilkada) The aspect of legal certainty is one of the important principles in the implementation of elections, as stipulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, precisely in Article 3. In the researcher's notes, the implementation of the Regional Elections in Bandung Regency in 2020, judging from the administrative operability approach, has not fully fulfilled the substance optimally. The minimum requirement for candidate support in the regional head election in the 2020 Bandung Regency Regional Election is related to election justice. To be able to register as a Candidate for Regent and Deputy Regent of Bandung in 2020, there are a number of requirements that must be met. One of the main requirements is to get the support of at least 153,443 (one hundred and fifty-three thousand four hundred and forty-three) voters registered in the Permanent Voter List (DPT) for the 2019 General Election. the legal position of the Bandung Regency Bawaslu in deciding case number 001/PS/BWSL. BDG.13.10/III/2020 concerning the minimum requirements for candidate support in the 2020 Bandung Regency regional head election Based on Article 30 letter c of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors that Bawaslu has authority in resolving election disputes.

Keywords: *Bawaslu Decision, Regional Elections, Elections.*